

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil analisis dan pembahasan diatas maka penelitian ini berkesimpulan bahwa :

1. Faktanya berdasarkan hasil analisa terlihat bahwa pemerintah mencanangkan beberapa program terkait dengan pengentasan kemiskinan yang mana program program tersebut melibatkan 14 OPD dan terdiri dari 39 program utama yang telah di alokasikan anggarannya untu kemiskinan
2. Program-program yang didukung oleh anggaran besar untuk kemiskinan banyak yang belum sesuai atau belum sejalan dengan strategi program kemiskinan yan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati No 16 Tahun 2017
3. Anggaran yang teralokasikan yaitu pada progra Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengemba ngan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program peningkatan ketahanan pangan, Program Pengembangan Perumahan, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Adapun Program program yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati No. 16 Tahun: Akses penerangan listrik, bantuan modal usaha ekonomi produktif, bantuan perlindungan rasa aman, santunan kematian, bantuan akses informasi, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

5.2 Saran

Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis diatas penulis merekomendasikan saran sebagai bereikut :

1. Terkait kesesuaian pangaanggaran pemerintah diharapkan dapat lebih memerhatikan daerah dengan melakukan riset dan evluasi terhadap keaaan kemiskinan di dearah agar penganggaran di setiap aspek aspek dapat berjalan dengan baik dan sesuai.
2. Upaya pemerintah kabupaten gorontalo utara dalam memantau dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifakasi kemiskinan dalam perancangan program program.
3. Perencanaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang nantinya bisa dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah.
4. Pemerataan program bantuan tunai kepada masyarakat untuk menjangkau keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin
5. Memperhatikan anggaran pemerintah yang sering mengendap disatu aspek agar semua aloaksi berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, B. Y. T., Randa, F., & Bangun, Y. K. (2019). Memaknai Dana Pengentasan Kemiskinan Dalam Penganggaran Daerah. *Ajar*, 2(01), 40-56
- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap *pertumbuhan* ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *EBBANK*, 6(1), 1-18.
- Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/KotadiProvinsiGorontalo,2014-2018
<https://gorontalo.bps.go.id/dynamictable/2018/01/12/236/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-gorontalo-2014-2018.html> (5/02/2020)
- Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara. Tabel Indikator Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2007-2008
<https://gorontaloutarakab.bps.go.id/dynamictable/2019/10/21/51/indikator-kemiskinan-kabupaten-gorontalo-utara-tahun-2007-2018.html> (5/02/2020)
- Dwi Febri Arifiyanto, 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No.3
- Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2). 327-338
- Fan, S., & Zhang, X. (2008). Public expenditure, growth and poverty reduction in rural Uganda. *African Development Review*, 20(3), 466-496
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India. *American journal of agricultural economics*, 82(4), 1038-1051.
- Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, *Pengendalian* Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 15 Pemerintah Daerah Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. Mendalo Darat : Jambi.
- Herlambang, P.W. 2004. Pro-Poor Budget: Analisis Anggaran sebagai Kerja Akar Rumput dan Startegi Merebut Sumberdaya Keputusan yang Berpihak Pada Rakyat Miskin. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Surabaya

- Husain, S. P. (2011). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Inovasi*, 8(03). 104
- Imelda RH N, I. R. N. (2005). Implementasi balanced scorecard pada organisasi publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 106-122.
- Krause, P. (2007). Strengthening Domestic Accountability in Malawi by Integrating the Poverty Reduction Strategy and the Budget. *GTZ Fiscal Study*, (10).1-34
- Krpano Panorama.(2011).Indikator Kemiskinan Menurut BPS.Melalui <https://catatanantilupa.wordpress.com/2011/10/31/indikatorkemiskinan-menurut-bps> (5/02/2020)
- Kuncoro, Mudrajat (2004) Otonomi Daerah Reformasi, Perencanaan *Strategi* dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo.2002. Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan *Daerah*.ANDI : Yogyakarta
- Muliati, M., Wulansari, D., & Handoyo, R. D. (2019). Alokasi *Anggaran* Publik Dan Pengentasan Kemiskinan Di Pulau Kalimantan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 371-384.
- Muslim., E.S. Haryadi dan D. Haryadi. 2004. Memahami Anggaran Peka Gender. *Bandung*: Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)
- Nasikun. Diktat Mata Kuliah Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.
- Nugraheni, R. S., Ananda, C. F., & Syafitri, W. Analisis Dampak *Alokasi* Anggaran Desa Dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten SEMARANG. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 169-182.
- Peraturan Bupati Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2017, Tentang Penanguulangan Kemiskinan
- Okpala, K. E. (2012). Strategic budgeting system and management of public resources: A Nigeria review. *European Journal of Business and Management*, 4(21), 171-180.
- Rahayu, S. L. (2016). Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Program Kemiskinan Pada Kementerian Negara/Lembaga. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(3), 55-88.

- Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan *Kemiskinan*. In Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal (Vol 21). 43-44
- Sahdan, Gregorius (2005) Menanggulangi Kemiskinan Desa dalam jurnal *Ekonomi Rakyat* diakses melalui http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/arti_kel_6.htm pada tanggal 25 April 2007 jam 19.28.
- Savitri, E., & Satriawan, R. A. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Riau University). 2-4
- Subandi, (2016) *Ekonomi Pembangunan*, Bandung:Alfabeta
- Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok: Basis perumusan intervensi kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(1), 29-30.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03). 121-122
- Wijanarko, S. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran “Gerdu Kempling” Sebagai Pengentasan Analisis Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 6(1), 95-106